

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 78 TAHUN
2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN
FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PADA BIDANG PROMOSI
PENANAMAN MODAL PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

**TRISDA ZAHARA
20.11.260P
ADMINISTRASI NEGARA**

ABSTRACT

Based on the problem formulation above, the author can create a research objective to determine the implementation of Governor Regulation Number 78 of 2016 concerning Organizational Structure, Job Description and Functions of the Investment Service and One-Stop Integrated Services in the Field of Investment Promotion. In conducting this research to obtain data, researchers prefer to use qualitative research methods, methods that emphasize the aspect of in-depth understanding of a problem. Researchers prefer to use in-depth analysis techniques, namely examining problems on a case-by-case basis because the method Qualitative believes that the nature of one problem will be different from the nature of other problems. In order for the research to get good results, the researcher collected complete data, namely in the form of primary data and secondary data. The researcher obtained the results of the analysis of the success of communication, namely, the transmission, clarity and consistency of communication that existed at the Telang Sari Village Office in the application of minimum service standards which was classified as ordinary, but in terms of transmission, consistency and clarity it could be considered good, because the delivery of information in communication . Based on the results of interviews, it was found that the communication carried out by Investment Promotion employees still had obstacles in collecting data on potential investment opportunities in the region in 2023. Based on the results of the research and discussion above, the author draws the conclusion that the implementation of Governor Regulation Number 78 of 2016 concerning Composition The organization, description of duties and functions of the One Stop Investment and Integrated Services Department is running well, however there are still several obstacles in terms of resources which state that there is a lack of information on investment potential and opportunities, the competence of HR personnel in the IT sector and poor spatial planning and poor internet connection. However, it has been proven that there are still obstacles in providing data and information regarding potential investment opportunities.

Keywords: Implementation, Organizational Structure, Job Description And Functions Of The Department Of Capital Investment

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan kemajuan suatu daerah dapat diukur dari meningkatnya perekonomian, ditandai dengan minat berinvestasi dan peran dari berbagai sektor. Hal ini sangat membutuhkan ketersediaan data potensi dan sumber daya suatu wilayah sehingga dapat diberdayakan dan dikembangkan menjadi sumber perekonomian suatu wilayah. Peranan data dan informasi sangat berpengaruh dalam spek kehidupan manusia. Pada saat yang sama tuntutan public terhadap keterbukaan informasi dan peningkatan kinerja pemerintah menjadi semakin tinggi maka pengelolaan data dan informasi yang baik pada akhirnya adalah suatu keharusan bagi pemerintah yang terintegrasi dalam sistem yang mudah diakses baik untuk kepentingan kebijakan pemerintah maupun investor.

Dalam dunia usaha, data dan informasi menjadi dasar pertimbangan pelaku usaha untuk menghitung kemampuan finansial, modal kerja, investasi dan keuntungan yang diharapkan. Oleh karenanya ketersediaan data dan informasi yang semakin akurat dan terbaru sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Pengembangan Sistem Informasi dalam menyajikan data dan informasi merupakan cara yang tepat dalam mempromosikan potensi dan peluang daerah yang terintegrasi dalam satu sistem.

Implementasi menurut kamus *Webster* berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Implement*, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Definisi lain dari implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek atau pengaruh pada sesuatu. definisi Implikasi atau implementasi juga dapat bervariasi menurut para ahli.

Penyediaan potensi dan peluang investasi merupakan keharusan suatu daerah baik melalui data dan informasi maupun ketersediaan dalam system Informasi guna memberikan Informasi kepada Investor ataupun para pihak dalam berinvestasi. Kontribusi dalam pencapaian target investasi adalah dengan memfasilitasi dan promosi potensi unggulan yang dimiliki oleh daerah, ketersediaan Peluang Potensi Investasi dilakukan melalui Pemetaan sumber-sumber potensi yang dimiliki oleh daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengembangkan Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi sehingga Investor dapat mengakses potensi sumber daya di provinsi dan peluang usaha sesuai wilayah dan sektor usaha yang akan membantu dalam proses pengambilan keputusan dalam berinvestasi.

Kegiatan investasi memberikan berbagai manfaat dan dampak positif bagi perkembangan ekonomi lokal dan nasional, peningkatan investasi tersebut tidak terlepas dari pesatnya kemajuan perkembangan pembangunan di berbagai wilayah di Provinsi Sumatera Selatan akibat aktifitas masyarakat yang terus berbenah dan membangun wilayahnya, serta mengelola potensi sumber daya alam dan asset manusia yang dimilikinya.

Salah satu upaya peningkatan peluang tersebut adalah melalui pendekatan dari berbagai aspek yang secara umum membuat gambaran tentang keadaan geografi, kondisi sosial dan perkembangan perekonomian, yang lebih menunjukkan arah serta lokasi dimana kegiatan sektoral tersebut dapat dikembangkan. Pendekatan tersebut mendorong lahirnya konsep pengelolaan

potensi sumber daya alam dan asset manusia yang harus mampu meningkatkan suatu daerah menjadi target tujuan investasi yang menarik.

Mengingat potensi sumber daya alam dan asset manusia merupakan hal yang dinamis, maka data dan informasi terkini yang akurat dan valid tentang potensi dan peluang investasi daerah dan keberadaannya menjadi sangat penting dalam perumusan kebijakan investasi di daerah. Ketersediaan data dan informasi potensi sumber daya tersebut sangat membantu para calon investor dalam memilih dan memutuskan minat rencana investasinya sesuai dengan bidang investasi dan wilayah/daerah yang diminatinya.

Salah satu upaya membantu calon investor mendapatkan data dan informasi potensi investasi, antara lain melalui pemetaan potensi dan peluang investasi daerah, Selain itu, kegiatan pemetaan potensi dan peluang investasi daerah juga merupakan upaya penting dalam mempromosikan potensi dan peluang investasi daerah yang siap dalam investasi sesuai ketersediaan sumber daya alamnya, fasilitas dan infrastruktur pendukung, serta dukungan kebijakan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Adanya peta potensi dan peluang investasi daerah tersebut diharapkan menjadi salah satu faktor pendorong penting dalam meningkatkan investasi di Provinsi Sumatera Selatan.

Selain menciptakan kondisi investasi bisnis yang kondusif dan menyebarkan informasi potensi peluang investasi, juga perlu dipromosikan secara tepat sasaran dan berkelanjutan khususnya calon investor di dalam negeri dan di luar negeri yang prospektif. Dengan meningkatnya jumlah investasi di Provinsi Sumatera Selatan maka diharapkan akan memberikan multiplier effect disegala bidang, sehingga bisa meningkatkan Investasi di Provinsi Sumatera Selatan.

Bidang promosi merupakan bagian untuk penyusunan dan pengembangan serta pemasaran mengenai potensi dan peluang investasi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dengan tujuan yakni meningkatkan investasi serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.

Program Promosi Penanaman Modal diharapkan dapat memberikan dan menyampaikan informasi mengenai peluang potensi investasi yang siap ditawarkan yang ada di seluruh kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan kepada para investor baik di dalam maupun di luar, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.

Merujuk kepada permasalahan tersebut di atas, penulis menganggap permasalahan ini sangat penting untuk dibahas dalam laporan ini dengan harapan agar nantinya bisa menjadi referensi bagi Bidang Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyediaan data potensi dan peluang investasi Sumatera Selatan

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Bidang Promosi Penanaman Modal”** .

LANDASAN TEORI

A. IMPLEMENTASI

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2004) (Webster dalam Wahab (2004:64) adalah :

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu) Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan.

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang–undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga–Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (2001) dalam (Wahab (2001:65) mengemukakan pendapatnya mengenai Pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut :

“Implementasi adalah tindakan–tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat–pejabat, kelompok–kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan–tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan–tindakan yang dilakukan oleh pihak–pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita–cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Badan–badan tersebut dalam melaksanakan pekerjaan–pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam prakteknya badan–badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan–pekerjaan di bawah mandat dari undang–undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Maka Mazmanian dan Sebastiar (2001) dalam (Wahab (2001:68) juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut :

“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang–undang, namun dapat pula berbentuk perintah–perintah atau keputusan–keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”

Berkaitan dengan hal tersebut menurut Mazmanian dan Sebastier, implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar, yang berbentuk undang–undang dan juga bisa berbentuk perintah atau keputusan–keputusan yang penting atau seperti Keputusan Badan Peradilan.

Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian outputnya adalah kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan. Implementasi bisa juga dianggap suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap *fix*.

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (2002) dalam (Harsono (2002:67) mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

“Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu Program”

Pengertian implementasi yang dikemukakan oleh Hanifah Harsono, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah suatu kebijakan dalam penyelesaian keputusan demi tercapainya tujuan yang baik dengan bergantung bagaimana implementasi yang berjalan dengan baik dalam melaksanakan proses penyempurnaan akhir. Oleh karena itu suatu implementasi baik diharapkan dalam setiap program untuk terciptanya tujuan yang diharapkan.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. *Majone dan Wildavsky* (2004) dalam (Nurdin dan Usman, (2004:70) mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. *Majone dan Wildavsky* mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan.

Adapun *Schubert* (2002) dalam (Nurdin dan Usman (2002:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa. Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

B. BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL

Dalam rangka penyebarluasan informasi tentang Provinsi Sumatera Selatan, serta upaya meningkatkan investasi, baik investasi asing maupun dalam negeri di Provinsi Sumatera Selatan maka disusun Program Promosi Penanaman Modal dengan dua kegiatan yakni Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi dan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi.

Mendatangkan investor untuk berinvestasi sudah barang tentu melalui persaingan yang merupakan salah satu kata kunci pada era *globalisasi* sekaligus dalam rangka akselerasi berkaitan dengan isu strategis pembangunan nasional antara lain peningkatan daya saing, peningkatan daya tahan ekonomi, peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat, serta pemantapan stabilitas sosial dan politik, sehingga diperlukan sesegera mungkin langkah-langkah inovasi, seyogyanya menjadi suatu gerakan yang harus dirancang dan

diimplementasikan secara sistemik, sistematis, dan terukur oleh seluruh aparat pemerintah dan komponen masyarakat, serta menyadari pentingnya daya saing dalam menghadapi situasi dan ekonomi *global* yang kian mengancam kekuatan-kekuatan perekonomian *domestic*.

Selain menciptakan kondisi investasi bisnis yang kondusif dan menyebarluaskan informasi potensi peluang investasi, juga perlu dipromosikan secara tepat sasaran dan berkelanjutan khususnya calon investor di dalam negeri dan di luar negeri yang prospektif. Dengan meningkatnya jumlah investasi di Provinsi Sumatera Selatan maka diharapkan akan memberikan multiplier effect disegala bidang, sehingga bisa meningkatkan Investasi di Provinsi Sumatera Selatan.

Program Promosi Penanaman Modal diharapkan dapat memberikan dan menyampaikan informasi mengenai peluang potensi investasi yang siap ditawarkan yang ada di seluruh kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan kepada para investor baik di dalam maupun di luar, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk menunjang tujuan dari program promosi penanaman modal maka bidang promosi menyusun dua kegiatan yakni Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi dan Pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi.

a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

Provinsi Sumatera Selatan dengan segala potensinya dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya. Dengan adanya kegiatan penyusunan strategi promosi penanaman modal maka data potensi disetiap kabupaten/kota dapat dikumpulkan berdasarkan sektor usaha dan wilayah sehingga dapat mempermudah dalam penyampaian informasi kepada para investor.

Kegiatan penyusunan strategi promosi yaitu merupakan kegiatan yang menyusun strategi promosi penanaman modal daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan menyusun rencana pertemuan/rapat bisnis dalam maupun luar negeri.

b. Pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

1) Sarana dan Prasarana

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki berbagai macam potensi unggulan daerah yang dapat ditawarkan kepada para investor, dengan adanya kegiatan Sarana dan prasarana maka potensi peluang investasi yang ada di kabupaten/kota dapat dikumpulkan dan dikelola dalam bentuk media cetak, elektronik dan media luar ruang sehingga dapat mempermudah dalam menyampaikan informasi kepada para investor.

2) Penyelenggaraan Pameran

Kegiatan Penyelenggaraan pameran merupakan kegiatan promosi yang dilakukan dengan cara mengikuti event-event Strategis Salah satunya yakni mengikuti penyelenggaraan pameran Investasi, dengan mengikuti pameran investasi tersebut maka informasi potensi peluang investasi yang telah dibentuk media cetak, elektronik dan media luar dapat disampaikan/diberikan kepada

masyarakat/investor yang hadir/ berkunjung pada penyelenggaraan pameran investasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Pada dasarnya metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Terdapat empat hal pokok yang penting untuk diperhatikan dalam metode penelitian yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah artinya kegiatan penelitian harus rasional, empiris dan sistematis. Rasional artinya kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia.

Empiris yaitu dapat di amati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian harus cocok dengan pendekatan penelitian yang dipilih. Prosedur, teknik, serta alat yang digunakan dalam penelitian harus cocok pula dengan metode penelitian yang ditetapkan. Dalam prakteknya terdapat sejumlah metode yang biasa digunakan untuk kepentingan penelitian.

PEMBAHASAN

Bab ini memuat gagasan peneliti yang terkait dengan apa yang telah dilakukan dan apa yang diamati selama melakukan penelitian, dipaparkan dan dianalisis di beberapa bab terdahulu. Uraian mengenai gagasan ini kemudian oleh peneliti dikaitkan dengan hasil kajian teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Bagian ini juga memaparkan pembahasan secara deskriptif tentang apa yang dibahas dari penelitian ini. Dimana pembahasan merupakan hasil observasi, wawancara dengan narasumber dan dokumentasi dengan mendapatkan informasi yang akurat benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga peneliti mendapatkan analisa jawaban dan penjelasan atas indikator yang benar dari sebuah implementasi Kebijakan dalam tugas dan fungsi Bidang Promosi Penanaman Modal dalam mengumpulkan, mengembangkan dan melaksanakan data potensi peluang investasi.

Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan hasil wawancara dan beberapa data yang didapatkan dilapangan, Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, peneliti mendapatkan analisa bahwa implementasi Kebijakan ini sepertinya berhasil dan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal ini dikatakan berhasil dengan melihat beberapa indikator dari Implementasi Kebijakan yang berhasil, dimana peneliti menggunakan teori dari Edward III :

a. Komunikasi

1. Temuan Penelitian

Peneliti menemukan bahwa komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan pilkades berjalan dengan baik.

2. Teori

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan komunikasi yaitu :

- a) Transmisi atau penyaluran komunikasi . Dalam hal ini sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi penyimpangan penyimpangan dalam implementasi.

Transmisi atau penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi contohnya adanya salah pengertian atau miskomunikasi yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi.

- b) Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu.
- c) Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi dalam kebijakan harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

3. Analisis Peneliti

Peneliti mendapatkan hasil analisa dari keberhasilan komunikasi yaitu, transmisi, kejelasan dan konsistensi komunikasi yang terjalin di Kantor Desa Telang Sari dalam penerapan standar pelayanan minimal tergolong biasa saja, namun dalam hal transmisi, konsistensi dan kejelasan sudah bisa di anggap baik, karena penyampaian informasi dalam komunikasi.

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pegawai Promosi Penanaman Modal masih adanya kendala

dalam Pengumpulan data potensi peluang investasi di daerah di tahun 2023.

b. Sumberdaya

1. Temuan Peneliti

Sumberdaya manusia dalam pelaksanaan menyusun dan mengumpulkan Data Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota baik, dikatakan baik karena pegawai yang mampu dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

Sumberdaya financial dalam pelaksanaan menyusun dan mengumpulkan Data Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota berjalan dengan baik karena sumberdana yang di dapatkan dari APBD mencukupi untuk pelaksanaan pengumpulan data potensi peluang investasi tersebut.

Sumberdaya sarana prasarana dalam menyusun dan mengumpulkan Data Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota berjalan dengan baik karena fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan memadai

2. Teori

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia sebagai implementor, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salahsatunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan pelaksana saja tidak cukup menyelesaikan masalah implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah evaluasi staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

Untuk anggaran tentu diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan. Sedangkan Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi memiliki dua bentuk yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

Kemudian dalam hal wewenang pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

Ketika berwenang tidak ada, maka kekuatan para pelaksana di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika berwenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan.

Yang terakhir adalah Fasilitas atau dalam kata lain sarana dan prasarana. Baik fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang memenuhi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung sarana dan prasarana maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Analisis Peneliti

Indikator berdasarkan sumberdaya di simpulkan bahwa sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial dalam pelaksanaan Pengumpulan dan penyusunan data potensi investasi sudah memadai dan bisa berjalan sesuai dengan prosedur yang ada sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

c. Disposisi / sikap

1. Temuan Peneliti

Adanya kendala dalam pengumpulan data potensi dan peluang investasi daerah yakni minimnya informasi potensi dan peluang investasi, kompetensi tenaga SDM bidang IT dan Tata ruang yang kurang serta jaringan internet yang lambat, terbukti masih ada kendala di Kabupaten/Kota dalam memberikan data dan informasi mengenai potensi peluang investasi unggulan daerah.

2. Teori

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006:162) sikap penerimaan atau penerimaan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi kebijakan yang dapat dilakukan untuk membuat keputusan dari warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan karena masalah yang mereka rasakan. Disposisi atau sikap pelaksana biasanya dipengaruhi oleh pengangkatan dan Insentif yang didapatkan para pegawai.

3. Analisis Peneliti

Hasil wawancara dalam Indikator Disposisi/sikap ditemukan bahwasannya sikap pegawai hampir keseluruhan sudah cukup baik dalam mengumpulkan, mengembangkan dan menyampaikan data dan informasi peluang potensi daerah pelayanan kepada pelaku usaha/ investor hanya saja ada beberapa di daerah Kabupaten/Kota yang masih kesulitan dalam memberikan data dan informasi potensi peluang investasi.

d. Struktur Birokrasi

1. Temuan Peneliti

Birokrasi DPMPTSP Prov. Sumsel sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di tahun 2023.

2. Teori

Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: *Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

3. Analisis Peneliti

Indikator berdasarkan struktur birokrasi berdasarkan wawancara ditemukan bahwa struktur birokrasi sudah baik dan berjalan sesuai dengan prosedur Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tidak ada kendala yang bisa mempengaruhi tugas dan fungsi di Bidang Promosi Penanaman Modal.

Faktor Penghambat Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat di simpulkan bahwa faktor penghambat dalam pengumpulan dan pengembangan data potensi peluang investasi dapat dipastikan dalam hal Faktor penghambat dalam pelaksanaan di lihat dari hasil wawancara dengan informan dengan peneliti bahwa adanya faktor penghambat pada salah satu indikator yaitu di dalam indikator Disposisi/ sikap yaitu minimnya informasi potensi dan peluang investasi, kompetensi tenaga SDM bidang IT dan Tata ruang yang kurang serta jaringan internet yang lambat.

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka penulis menarik simpul sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjalan dengan baik hanya saja masih terdapat beberapa kendala pada Sumber Daya yang menyatakan bahwa minimnya informasi potensi dan peluang investasi, kompetensi tenaga SDM bidang IT dan Tata ruang yang kurang serta jaringan internet yang lambat terbukti masih ada kendala dalam memberikan data dan informasi mengenai potensi peluang investasi.
2. Proses Penyusunan dan Penyampaian data potensi peluang investasi kabupaten/Kota berjalan dengan baik dan tidak ada kendala, mulai dari Menganalisa data serta penyampaian data dan informasi kepada para pelaku usaha/investor melalui berbagai macam media.

B. SARAN

1. Sebaiknya diharapkan Kabupaten/Kota meningkatkan kualitas SDM dalam pemahaman IT dan Tata Ruang serta meningkatkan kualitas internet, sehingga tidak ada lagi kendala dalam memberikan data serta Informasi Peluang Potensi Investasi Kabupaten/Kota ke Provinsi, dengan lancarnya dalam penyampaian data serta informasi Peluang Potensi Investasi, DPMPTSP Prov. Sumsel dapat menyalurkan/menyampaikan data tersebut kepada para masyarakat/pelaku usaha/investor dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian di daerah/kab/kota tersebut.
2. Pegawai Daerah Kabupaten/Kota diharapkan untuk mengikuti pelatihan di bidang IT dan Tata Ruang sehingga mempermudah dalam menyusun data potensi investasi daerah. Dengan kualitas SDM yang baik dan memadai maka tercapainya pelayanan dalam memberikan data potensi peluang investasi unggulan sebagai data yang siap untuk ditawarkan kepada para pelaku usaha/investor.